



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

**Jurnal Hukum**

**SAMUDRA KEADILAN**

**Editorial Office :** Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

# KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGUNAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

<sup>1</sup>Jhony K. Yoppy, <sup>2</sup>Risno Mina, <sup>3</sup>Firmansyah Fality

*Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk  
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 79 Luwuk Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah 94711  
<sup>1</sup>Jhonyky@gmail.com, <sup>2</sup>risnomina78@gmail.com, <sup>3</sup>firmansyahfality@yahoo.com*

---

## Abstract

Transparency to the use of village funds is a good governance indication. The purpose of this study is to analyze the public information transparency in the use of village funds. The empirical juridical is used as research method. In Peley Village, South Totikum sub-district, Banggai Kepulauan Regency, public information transparency in the use of village funds has not been implemented because it does not have yet a Village Regulation. In addition, a Village Information and Documentation Management Officer have not been formed. However, to provide financial management, the Village Government is only limited to making billboards about the structure of the Village Budget.

Keywords: Redesign of campaign, regional election 2020, pandemic Covid-19

---

## Abstrak

Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya serta implementasi keterbukaan informasi publik dalam penggunaan dana desa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Di Desa Peley kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan keterbukaan informasi publik dalam penggunaan dana desa belum terlaksana karena belum memiliki Peraturan Desa tentang keterbukaan informasi publik desa. Selain itu belum dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa. Namun untuk memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan, Pemerintah Desa baru sebatas membuat baliho tentang struktur APBDesa.

Kata kunci: Keterbukaan, Informasi publik, Dana Desa

## PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa), menempatkan desa sebagai bagian terdepan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan berbagai kegiatan pembangunan di desa. Sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Undang-undang Desa bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga diberikan tanggung jawab untuk mengelola keuangan yang memadai untuk dapat menggali potensi sumber pendapatan desa.

Konsistensi pemerintah untuk mendukung pengembangan dan kesejahteraan tersebut dengan mengalokasikan dana desa setiap tahunnya. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Rinciannya adalah Rp 20,67 triliun pada tahun 2015, Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017, Rp 60 triliun pada tahun 2018), dan pada tahun berjumlah Rp 70 triliun.<sup>1</sup> Anggaran tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa, sebagai bukti implementasi otonomi desa. Begitu besar peran yang diterima oleh pemerintah desa, sehingga harus dipertanggung jawabkan. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus menerapkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana seluruh aktifitas pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Demi tercapainya pembangunan desa tentunya harus dilaksanakan secara gotong royong antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu kegiatan pembangunan harus dapat memanfaatkan potensi kearifan lokal dan potensi sumber daya alam yang ada. Sebagai bukti penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya didukung oleh pembiayaan melalui keuangan desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta pendapatan asli desa. Keuangan desa adalah keseluruhan uang yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa merupakan keuangan negara. Keuangan negara adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun sesuatu dalam bentuk uang maupun barang dijadikan sebagai milik negara sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>3</sup>

Era keterbukaan yang mengiringi Reformasi 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan.<sup>4</sup> Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang KIP), bahwa pemerintah desa termasuk dalam badan publik. berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, pada pokoknya menjelaskan bahwa badan publik adalah suatu badan yang menyelenggarakan tugas negara atau pemerintahan,

---

<sup>1</sup>Kompas (2 Mei 2020) <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/totaldana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>

<sup>2</sup> Devi S. Dimalaya, *et.al.*, *Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai*, Jurnal Yustisiabel Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018

<sup>3</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pres, Jakarta, hal 2

<sup>4</sup>Dhoho A. Sastro, *et al.*, 2010, *Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta. Hal 1

dimana sebagian atau seluruh dana atau biaya penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Konsekuensi sebagai badan publik, pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi publik kepada masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.<sup>5</sup>

Penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan pembangunan desa oleh pemerintah desa merupakan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana dalam Undang-Undang KIP pada Pasal 4 huruf a menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan salah satu desa dari 74.954 desa pada tahun 2019 sebagai penerima kucuran dana desa dari pemerintah pusat melalui kementerian keuangan. Dana desa yang masuk di desa tersebut melebur kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan APBDesa tersebut merupakan bentuk pengelolaan keuangan desa. Tahapan pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan.<sup>6</sup> Sehingga pengelolaan keuangan desa yang didalamnya termasuk dana desa merupakan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Desa dan peraturan pelaksanaannya dan mekanisme keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP beserta peraturan pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan masih kurang masyarakat memahami dan mendapatkan keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa.

Pentingnya keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa adalah dalam rangka transparansi, sehingga pemerintah desa harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk itu permasalahan yang akan dikaji adalah seberapa penting keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa dan bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu memperoleh data langsung dari Pemerintahan Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, bahwa dalam penelitian hukum empiris, keberadaan hukum tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia.<sup>7</sup> Adapun Sumber data meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana Penelitian ini menghasilkan data

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>6</sup>Devi S. Dimalaya, *op.cit.*

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Daulisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 44

yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingah laku yang dapat diobservasi dari manusia.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Informasi publik merupakan hak setiap warga negara dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menurut Faisal Abdullah bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus mewujudkan pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Hak tersebut tentu harus mendapatkan perlindungan sehingga pelaksanaannya tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Informasi publik tersebut tentunya akan memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai lembaga publik maupun masyarakat. Diberikannya akses masyarakat perihal informasi sehingga lembaga/badan publik akan termotivasi untuk bertanggungjawab dan memberikan jalan kepada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya.<sup>10</sup>

Desa ialah kesatuan masyarakat memiliki struktur pemerintahan yang bertugas mensejahterakan masyarakat merupakan pengejawantahan dari tujuan negara. Adapun otonomi desa adalah pemerintahan asli, bulat, dan utuh dan bukan merupakan hasil pemberian dari pemerintahan di atasnya. Sehingga pemerintah berkewajiban menjaga sistem pemerintahan yang dimiliki oleh desa tersebut.<sup>11</sup> Sebagai badan atau lembaga publik di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Undang-Undang KIP), tentunya memiliki tanggungjawab yang sama untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk itu sangat penting kemudian informasi penyelenggaraan pemerintahan dapat di peroleh masyarakat sebagai bentuk peran sertanya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Peran masyarakat tersebut merupakan hak yang telah dijamin oleh konstitusi pada Pasal 28F Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Keterbukaan informasi publik ditingkat penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan unsur penting untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang terbuka. Keterbukaan tersebut memberikan porsi kepada masyarakat desa untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga menjadi penting informasi publik tersebut sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang KIP.

Untuk mengetahui seberapa penting keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa sebagai salah satu rangkaian pengelolaan keuangan desa, telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang KIP yang menjadi dasar hukum pencapaian tujuan keterbukaan informasi publik. Masyarakat atau publik di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan

---

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 16

<sup>9</sup> Faisal Abdullah, 2009, *Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*, Pukap, Makassar. Hal. 3

<sup>10</sup> Eko Noer Kristiyanto, 2016, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 231 - 244

<sup>11</sup> HAW Widjaja, 2008, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 165

pembangunan di desa tersebut. Sehingga penting kemudian keterbukaan informasi publik oleh pemerintahan desa.

Untuk itu, keterbukaan informasi oleh Pemerintah Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap penggunaan dana desa, sangatlah penting untuk transparansi dan pertanggungjawaban pemanfaatan dan penggunaannya. Sehingga untuk mengetahui pentingnya keterbukaan informasi publik maka harus sesuai dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya informasi publik tersebut. Manfaat ataupun tujuannya telah diatur pada Pasal 3 Undang-Undang KIP. Keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan sangat penting, hal ini disebabkan bahwa informasi publik terhadap penggunaan dana desa, akan:

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan dan penggunaan dana desa
2. Melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa
3. Mendorong penggunaan dana desa berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan
5. Meningkatkan kualitas penggunaan dana desa

Hal yang membuat keterbukaan informasi terhadap penggunaan dana desa di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi penting sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, akan diuraikan berikut ini.

a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan dan penggunaan dana desa

Pemberian informasi tersebut agar masyarakat Desa Peley mengetahui rencana pembuatan kebijakan dana desa, program yang menggunakan dana desa, dan proses pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa, serta alasan pengambilan suatu keputusan terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan dana desa. Setiap perangkat desa difungsikan perannya sebagai humas desa yang berkewajiban memberikan informasi secara jelas sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Pemberian informasi menjadikan masyarakat akan mengetahui sasaran program dan penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN kemudian dimasukkan kedalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sebagai sumber pendapatan. pemerintah desa wajib menyapaikan informasi penggunaan dana desa supaya masyarakat mengetahui program apa yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa bahwa terdapat informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta serta yang wajib tersedia setiap saat oleh pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa dana desa masuk menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), sehingga pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan pemerintah desa yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018)

b. Melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa

---

<sup>12</sup> Dikhorir Afnan, 2019, *Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Soshum Insentif ISSN 2655-268X | 2655-2698  
Volume 2, No. 2 Tahun 2019: 153-163

<sup>13</sup> Masri selaku masyarakat Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 10 September 2020

Pelibatan masyarakat dalam hal ini lahirnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan pengelolaan dana desa. Dana desa yang sudah masuk menjadi struktur APBDesa, sehingga penggunaannya dilakukan dengan kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Untuk itu keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa dimulai dari pembahasan RKPDesa dan APBDesa melalui musyawarah desa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) bahwa musyawarah desa ialah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh Pemerintah desa dan unsur masyarakat dalam rangka bersepakat terhadap permasalahan yang strategis. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD untuk membahas RKPDesa dan APBDesa.<sup>14</sup> Musyawarah desa merupakan rapat yang dilaksanakan secara terbuka, untuk itu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KIP, bahwa setiap orang berhak untuk menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum dalam mendapatkan informasi tersebut. Undang-Undang KIP juga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

- c. Mendorong penggunaan dana desa berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Adapun beberapa asas dalam AUPB yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap penggunaan dana desa adalah asas manfaat dan keterbukaan. Dari asas manfaat penggunaan dana desa agar sesuai dengan kepentingan masyarakat, keterpaduan kepentingan pemerintah desa dengan masyarakat. Agar hal ini bisa tercapai maka dibutuhkan keterbukaan informasi publik dalam penggunaan dana desa.

Selain itu asas keterbukaan dalam penggunaan dana desa adalah masyarakat diberikan akses untuk mendapatkan informasi penggunaan dana desa, dimana informasi publik tersebut harus benar, jujur dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat wajib mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa.<sup>15</sup>

Apabila tidak ada partisipasi dan kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi, maka tidak akan ada interaksi antara warga masyarakat dengan pemerintah, hal ini tentunya akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang KIP, keterbukaan informasi bertujuan agar penyelenggaran Negara atau pemerintah dilaksanakan dengan baik, yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 huruf d). Hal ini juga termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

- d. Mengembangkan ilmu pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, arti ilmu pengetahuan merupakan perpaduan terhadap bermacam-macam pengetahuan dan tersistematik dan logis dengan mempertimbangkan sebab dan akibat. Sehingga prinsip Mengembangkan ilmu pengetahuan mengandung maksud bahwa keterbukaan informasi publik akan memberikan daya kritis masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menyimpang dari tujuannya.

<sup>14</sup> Yosef selaku masyarakat Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 10 September 2020

<sup>15</sup> Kisman Maika sebagai Sekretaris Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 2 September 2020

<sup>16</sup> Eko Noer Kristiyanto, *Op.cit.*

Termasuk juga dalam keterbukaan informasi terhadap penggunaan dana desa. Sejalan dengan meningkatnya daya kritis masyarakat adalah peningkatan pemahaman masyarakat perihal hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang disiapkan oleh lembaga pemerintah.<sup>17</sup>

Begitu juga dengan keterbukaan informasi penggunaan dana desa di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, walaupun informasi yang diberikan oleh pemerintah desa terbatas pada APBDesa dalam bentuk spanduk, paling tidak memberikan informasi kepada kami untuk terus mencari informasi tentang bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan.<sup>18</sup> Prinsip ini tentunya memotivasi masyarakat untuk selalu mencari informasi untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini sebagaimana maksud Pasal 3 huruf f Undang-Undang KIP, yakni tujuan KIP ialah sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai proses pelaksanaan pemerintahan dengan adanya keterbukaan informasi, dapat meningkatkan perhatian dan kehendak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan sesuai dengan pengetahuan atau kompetensi masing-masing.<sup>19</sup>

e. Meningkatkan kualitas penggunaan dana desa

Keterbukaan informasi terhadap penggunaan dana desa akan melibatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan tersebut tentunya akan menjadikan proses penggunaan dana desa semakin berkualitas karena selalu dilakukan pengawasan agar tidak menyimpang dari peruntukannya. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa, maka pemerintah desa selaku pihak yang melaksanakannya akan berhati-hati, sehingga sesuai dengan ketentuan.<sup>20</sup>

Hal ini tentunya menjadi salah satu tujuan lahirnya Undang-undang KIP. Pada Pasal 3 huruf g menerangkan bahwa keterbukaan informasi bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan publik oleh badan publik untuk mendapatkan layanan informasi yang baik dan bermutu. Keterbukaan informasi mencegah penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah, sehingga melahirkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik juga melahirkan juga layanan yang berkualitas.

## 2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan

Keterbukaan informasi mempunyai tujuan yang lebih esensial yaitu menjamin hak masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah (*the public's right to know*). Pemerintah yang tidak mampu memahami kebutuhan masyarakat dengan benar akan kesulitan ketika harus mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan urusan hajat hidup masyarakat.<sup>21</sup>

Begitu pentingnya keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan pelayanan publik, mewajibkan pelaksanaannya dalam setiap aktifitas pemerintahan. Untuk memberikan hak masyarakat

<sup>17</sup> Nunuk Febrianingsih, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju tata Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1 April 2012

<sup>18</sup> Andi selaku masyarakatDesa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 10 September 2020

<sup>19</sup> Nunuk Febrianingsih, *Op.cit*

<sup>20</sup> Busran Bakri Kasidae, Ketua BPD Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 1 September 2020

<sup>21</sup> Rahmadhona Fitri Helmi, Iip Permana, Yuliarti Yuliarti, 2021, *Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat E-ISSN: 2684-8570, Vol. 3 No. 1: 28-38

tersebut yang telah dijamin oleh konstitusi, maka pelaksanaannya harus mendapatkan perlindungan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk melindungi keterbukaan informasi publik, telah lahir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang disebut sebagai Undang-Undang KIP. Keterbukaan informasi publik ialah bagian penting dari pelaksanaan pelayanan publik, selain itu, merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap hak-hak masyarakat lainnya.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang KIP disebutkan bahwa badan publik adalah termasuk lembaga eksekutif. Dimana lembaga eksekutif tersebut meliputi juga pemerintahan desa. Peraturan pelaksana keterbukaan informasi publik dilingkungan pemerintahan desa, adalah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa badan publik desa terdiri atas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha milik Desa (BUMDesa), serta Badan Kerjasama Antar Desa. Dengan adanya ketentuan tersebut menjadi wajib pemerintah desa menyediakan informasi yang menjadi hak masyarakat.

Sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis dengan mengarusutamakan transparansi dalam rangka menjamin kepastian proses pengelolaan keuangan Desa.<sup>23</sup>

Penggunaan dana desa merupakan implementasi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, menyebutkan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya termasuk penggunaan dana desa ialah salah satu informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara periodik oleh pemerintah desa. Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, implementasi APBDesa tahun 2019 berdasarkan Peraturan Desa Peley Nomor 3 Tahun 2019.

Keterbukaan informasi publik desa dalam hal ini penggunaan dana desa harus diselenggarakan Berdasarkan Undang-Undang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018, bahwa kewajiban pemerintah desa untuk memberikan layanan informasi publik desa termasuk didalamnya penggunaan dana desa adalah:

- a. Menetapkan Peraturan Desa tentang keterbukaan informasi publik desa
- b. Melaksanakan alur pelayanan informasi publik desa
- c. Pembiayaan
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana
- e. Pemutakhiran daftar informasi publik desa
- f. Menyediakan dan membagikan informasi publik desa

Kewajiban pemerintah desa tersebut menjadi dasar untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan sudah dilaksanakan. Untuk itu, akan uraikan pelaksanaannya berikut ini.

1. Menetapkan Peraturan Desa perihal keterbukaan informasi publik desa

---

<sup>22</sup>Eko Noer Kristiyanto, *Op.cit.*

<sup>23</sup> Andriana Grahani F., Rony Kurniawan, 2017, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*, RES PUBLICA Volume 1 No. 3, September - Desember 2017: 41-56



Untuk memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik desa maka pemerintah desa wajib menetapkan peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik (Pasal 7 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018). Peraturan desa tersebut menjadi dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik yang ada di desa bersangkutan. Walaupun sebenarnya pengaturan tentang pelayanan keterbukaan informasi publik telah ada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Namun keberadaan peraturan desa tersebut menjadi dasar dalam menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa).

PPID Desa merupakan lembaga yang memberikan pelayanan terkait informasi publik yang ada di desa. Penggunaan dana desa sebagai salah satu informasi publik desa dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait keterbukaan informasi publik. Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan belum memiliki peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik di desa. Belum adanya peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik termasuk pembentukan PPID Desa, hal ini karena belum ada bimbingan teknis tentang PPID Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.<sup>24</sup> Hal ini sesuai juga dengan yang disampaikan oleh Abdul Bakri bahwa BPD Desa Peley belum pernah membahas dan menetapkan peraturan desa menyangkut keterbukaan informasi publik termasuk informasi dari BPD sebelum kami.<sup>25</sup>

Walaupun belum memiliki peraturan desa dan PPID Desa, namun keterbukaan informasi publik dalam hal ini penggunaan dana desa harus tetap dilaksanakan. Kewajiban Pemerintah Desa untuk memberikan informasi publik tersebut mengacu pada Undang-Undang KIP dan Peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut juga menjadi amanat Undang-Undang Desa pada Pasal 26 ayat 4 huruf p bahwa kepala desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat.

## 2. Melaksanakan alur pelayanan informasi publik desa

Untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik desa yang baik maka harus mengikuti alur pelayanan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut pelayanan informasi dilakukan oleh PPID. Peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik dan PPID di Desa Peley belum dibentuk, namun kami selaku pihak pemerintah desa akan memberikan informasi terkait penggunaan dana yang merupakan bagian dari APBDesa.<sup>26</sup> Karena belum terbentuknya PPID di Desa Peley, praktis alur pelayanan informasi publik desa sebagaimana diatur dalam peraturan komisi informasi belum dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 bahwa Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Sekretaris sebagai PPID. Untuk melaksanakan tugasnya pada Pasal 9 dijelaskan bahwa yang menjadi tanggung jawab PPID Desa dalam layanan Informasi Publik Desa meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa. Walaupun PPID Desa Peley belum terbentuk, namun pemerintah desa melalui Sekretaris Desa melakukan pelayanan informasi walaupun belum sesuai dengan alur pelayanan yang diharapkan dalam Peraturan komisi informasi.

## 3. Pembiayaan

Untuk memberikan pelayanan terhadap informasi publik di desa tentu membutuhkan biaya untuk operasional dan sarana dan prasarana. Mendasari pada Pasal 7 huruf c, bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik Desa

---

<sup>24</sup> Rusli Bailia selaku Kepala Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 1 September 2020

<sup>25</sup> Abdul Bakri anggota BPD Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 7 September 2020

<sup>26</sup> Kisman Maika selaku Sekretaris Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 2 September 2020

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan belum membentuk PPID sehingga pembiayaan terhadap operasionalnya tidak disiapkan. Untuk pembiayaan terkait keterbukaan informasi penggunaan dana desa, melalui pembiayaan untuk Papan informasi, Baliho APB Desa dan Baliho realisasi APBDesa.<sup>27</sup>

Untuk penyediaan pembiayaan pemerintah desa memasukan dalam APBDesa, karena pelayanan informasi publik merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Sehingga pelayanan informasi publik desa termasuk penggunaan dana desa disediakan pembiayaan untuk kelancaran pelayanan dimaksud.

#### 4. Menyiapkan sarana dan prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, sarana ialah semua objek yang bisa digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud ataupun tujuan. Sedangkan prasarana ialah semua objek yang merupakan pendukung utama terlaksananya suatu prosedur atau tahapan. Sehingga dapat dimaknai bahwa sarana dan prasarana merupakan seperangkat objek utama ataupun pendukung untuk melaksanakan tahapan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Mengenai sarana dan prasarana dalam keterbukaan informasi publik desa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan terpenuhinya hak asasi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan perihal sarana dan prasarana untuk keterbukaan informasi publik terhadap penggunaan dana desa disiapkan oleh pemerintah desa. setiap tahun terdapat baliho tentang APBDesa dan baliho Realisasi yang dipasang ditempat yang dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Penyediaan saran dan prasaran untuk mendukung pelayanan informasi publik desa termasuk papan pengumuman dan meja informasi sebagaimana telah diatur pada Pasal 7 huruf d peraturan Komisi Informasi No. Nomor 1 Tahun 2018.

#### 5. Pemutakhiran daftar informasi publik desa

Daftar informasi publik desa merupakan bentuk layanan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf e bahwa pemerintah desa berkewajiban menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik Desa tentang semua Informasi Publik Desa yang dikelolanya.

Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan walaupun belum membentuk PPID Desa, namun penyelenggaraan informasi publik desa dilakukan oleh Sekretaris Desa. Daftar informasi desa dilakukan penyesuaian dengan informasi publik desa yang baru, walaupun belum ditetapkan PPID Desa, namun tugas-tugas PPID Desa dilaksanakan oleh Sekdes karena hal tersebut termasuk ruang lingkup tugasnya.<sup>29</sup>

Dari hasil penelitian bahwa sekretaris desa pernah mengikuti sosialisasi tentang Undang-undang KIP sehingga secara umum dapat mengetahui mengenai adanya keterbukaan informasi publik termasuk penggunaan dana desa harus diinformasikan kepada masyarakat. Menginformasikan kepada

---

<sup>27</sup>Rusli Bailia selaku Kepala Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 1 September 2020

<sup>28</sup>Atrin salah satu tokoh perempuan Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 10 September 2020

<sup>29</sup> Kisman Maika selaku Sekretaris Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 2 September 2020

masyarakat penggunaan dana desa selain telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

#### 6. Menyediakan dan membagikan informasi publik desa

Informasi publik desa termasuk penggunaan dana desa wajib disediakan dan dipublikasikan oleh pemerintah desa, hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf f Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018. Keterbukaan informasi tersebut merupakan prasyarat terjadinya partisipasi masyarakat.<sup>30</sup>

Walaupun dalam pemberian pelayanan informasi publik desa tersebut belum sama persis yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi, Namun Pemerintah Desa Peley telah berupaya untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa walaupun sesuai kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki.

Untuk informasi publik desa terhadap penggunaan dana desa, di Desa Peley informasi mengenai penggunaan dana desa yang masuk dalam APBDesa diberikan informasinya kepada masyarakat melalui baliho, namun pemerintah desa juga menerima masukan secara lisan baik dari masyarakat langsung maupun melalui BPD.<sup>31</sup> Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa selain sudah menjadi amanat Undang-Undang KIP dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2018, ini juga dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan asas transparansi dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa serta Permendagri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

## PENUTUP

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik terhadap penggunaan dana desa Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, disebabkan bahwa informasi terhadap penggunaan dana desa akan memberikan informasi tentang pemanfaatan dan penggunaan dana desa, akan melibatkan Masyarakat dalam pengelolaan dana desa, akan mendorong penggunaan dana desa berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, akan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan akan meningkatkan kualitas penggunaan dana desa. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terhadap penggunaan dana desa Di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan belum terlaksana sesuai dengan indikator yang diamanatkan oleh Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010

Dhoho A. Sastro, *et al.*, *Mengenal Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta. 2010

---

<sup>30</sup>Henri Subagyo, 2014, *Buku Pegangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik*, USAID-KINERJA, Jakarta. Hal 2

<sup>31</sup>Rusli Bailia selaku Kepala Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan, wawancara, 1 September 2020

Faisal Abdullah, *JalanTerjal Good Governance Prinsip, Konsep & Tantangan Dalam Negara Hukum*, Pukap, Makassar. 2009

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Rajawali Pres, Jakarta. 2008

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Daulisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2013

HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan utuh*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2008

Henri Subagyo, *Buku Pegangan Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Untuk Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik*, USAID-KINERJA, Jakarta. 2014

### **Artikel Jurnal:**

Andriana Grahani F., Rony Kurniawan, 2017, *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar*, RES PUBLICA Volume 1 No. 3, September - Desember 2017: 41-56

Devi S. Dimalaya, dkk., 2018, *Pelaksanaan Tugas Bendahara dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sobol Baru Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai*, Jurnal Yustisiabel Volume 2 Nomor 2 Oktober 2018

Dikhorir Afnan, 2019, *Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik*, Jurnal Soshum Insentif ISSN 2655-268X|2655-2698 Volume 2, No. 2 Tahun 2019: 153-163

Eko Noer Kristiyanto, 2016, *Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 2, Juni 2016 : 231 - 244

Nunuk Febrianingsih, 2012, *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju tata Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembina Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1 April 2012

Rahmadhona Fitri Helmi, Iip Permana, Yuliarti Yuliarti, 2021, *Pembentukan PPID Nagari Sebagai Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, ABDI: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat E-ISSN: 2684-8570, Vol. 3 No. 1: 28-38

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

***Website:***

<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/17333511/total-dana-desa-2019-2024-rp-400-triliun>.  
diakses 2 Mei 2020

<https://kbbi.web.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring